

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN LINGGA

Aldi Eka Saputra¹, Kustiawan², Handrisal³

Aldiealdiekasaputra@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

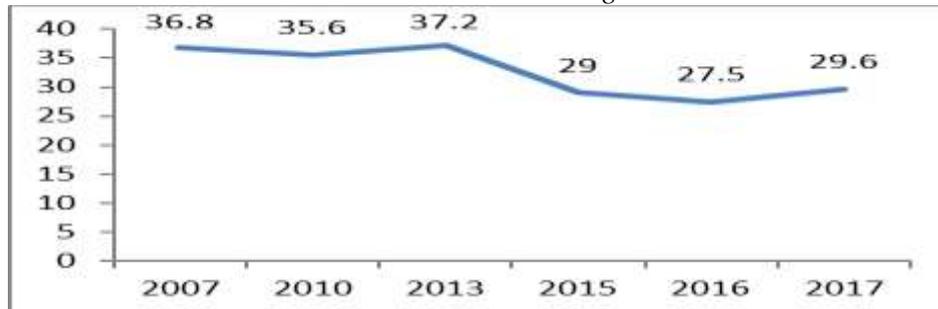
Stunting is one of the problems that hinders human development globally. Indonesia is the fifth country that has the highest prevalence of stunting children after India, China, Nigeria, and Pakistan. The Indonesian government targets the stunting rate to fall to 14 percent by 2024. The President of the Republic of Indonesia appointed the head of the BKKBN to be the chief executive of the Acceleration of Stunting Reduction. In overcoming stunting, the BKKBN is ready to mobilize the support of 13,734 PKB/PLKB personnel and 1 million cadres spread throughout Indonesia. To prevent this, the government has also launched an integrated stunting prevention intervention program that involves cross-ministerial and institutional. This study aims to find out how the Lingga district government's efforts to reduce stunting rates in Lingga district, the research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation related to efforts to reduce stunting rates in Lingga Regency. The data obtained is then analyzed qualitatively by examining all the data that has been collected and supported by the results of interviews with a theoretical approach. According to Adisasmita (2011: 22) which suggests that management is not only carrying out an activity, but is a series of activities that include management functions that are affected by planning, implementation, and supervision. From the results of the study, it can be seen that based on the results of the study, it can be concluded that the efforts of the Lingga district government in reducing stunting rates in Lingga district are quite good, but from the three indicators used are planning, implementation, and supervision. There is one indicator that has not been maximized, namely planning.

Keywords: Effort, Implementation, Stunting

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kelima yang memiliki prevalensi anak stunting tertinggi setelah India, China, Nigeria, dan Pakistan. Saat ini, prevalensi anak stunting dibawah 5 tahun di Asia Selatan sekitar 38%. Hasil Riset Kesehatan Dasar memcatat prevalensi stunting pada tahun 2007 yaitu sebesar 36,8% sempat turun menjadi 35,6% pada tahun 2010 ,namun meningkat menjadi 37,2% pada tahun 2013. Dari prevalensi tersebut dapat dilihat bahwa prevalensi stunting di Indonesia justru meningkat sebesar 1,6% dalam kurun waktu 2010-2013 atau 0,4% pertahun. Menurut WHO, prevalensi balita pendek menjadi masalah kesehatan masyarakat jika prevalensi 20% atau lebih.

Grafik 1. Prevalensi *Stunting*



Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan

Karenanya persentase balita pendek di Indonesia masih tinggi dan merupakan masalah kesehatan yang harus ditanggulangi. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Anak merupakan aset masa depan bangsa. Bisa dibayangkan, bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia dimasa yang akan datang jika saat ini banyak anak Indonesia yang menderita stunting. Dapat dipastikan bangsa ini tidak akan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam menghadapi tantangan global. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah mencanangkan program intervensi pencegahan stunting terintegrasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Pada tahun 2018, ditetapkan 100 kabupaten di 34 provinsi sebagai lokasi prioritas penurunan stunting. Jumlah ini akan bertambah sebanyak 60 kabupaten pada tahun berikutnya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi.

Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi, juga bahwa upaya perbaikan gizi tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman yang selama ini masih tersebar dalam berbagai pedoman yang belum bersifat regulasi. Secara makro, dibutuhkan ketegasan kebijakan, strategi, regulasi, dan koordinasi lintas sektor dari pemerintahan dan semua stakeholder untuk menjamin terlaksana poin-poin penting seperti pemberdayaan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan yang secara tidak langsung akan mengubah budaya buruk dan paradigma.

Pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Presiden Republik Indonesia menunjuk kepala BKKBN menjadi ketua pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Dalam mengatasi stunting BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga PKB/PLKB dan 1 juta kader yang tersebar diseluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri sebagai pengelola bagian data kependudukan akan berbagi data sebanyak 271 juta penduduk, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri akan berkontribusi melakukan konvergensi upaya penurunan stunting melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan akan menerbitkan petunjuk teknis bagi pemerintah provinsi untuk melakukan penilaian kinerja kabupaten atau kotadalam melaksanakan delapan aksi konvergensi penurunan stunting. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2018 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia selanjutnya disingkat AKG adalah suatu kecukupan gizi rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal seperti acuan dalam menilai

kecukupan gizi, acuan dalam menyusun makanan sehari-hari termasuk perencanaan makanan di institusi, acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional, acuan pendidikan gizi, dan acuan tabel pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi.

Tabel 1.1 Perbandingan Persentasi Stunting 2017

| NO | KOTA / KABUPATEN | PERSENTASE STUNTING |
|----|------------------|---------------------|
| 1 | Lingga | 33,2% |
| 2 | Anambas | 24,6% |
| 3 | Tanjungpinang | 20,8% |
| 4 | Batam | 20,7% |
| 5 | Karimun | 19,8% |
| 6 | Natuna | 19,7% |
| 7 | Bintan | 19,5% |

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Data stunting tertinggi di kabupaten Lingga sebesar 33,2% menurut dinas kesehatan kabupaten Lingga. Ada berbagai penyebab terjadinya gizi buruk dan gizi kurang terhadap anak balita di Kabupaten Lingga. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Lingga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kabupaten Lingga menggelar rembuk stunting tahun 2021, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat serta tamu undangan. Upaya penurunan stunting bukan hanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan tetapi juga berkaitan dengan air bersih, sanitasi layak, ketahanan pangan keluarga dan pola asuh dalam keluarga, sehingga semua sektor terkait termasuk tim penggerak PKK juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam penurunan angka stunting. Beberapa hal penting yang harus dilakukan agar semua proses penanggulangan stunting bisa berjalan sukses yakni komitmen bersama, kampanye, konvergensi program, akses pangan bergizi dan monitoring program. Untuk mempermudah pemahaman, difokuskan kegiatan konvergensi pencegahan stunting didesa bagi sasaran rumah tangga, dan perlu beberapa intervensi diantaranya kenseling gizi terpadu, air bersih dan sanitasi, jaminan sosial dan kesehatan, pendidikan anak usia dini dan kesehatan ibu dan anak. Adapun teori yang digunakan adalah Adisasmita (2011: 22) yang mempunyai tiga indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasantujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut, Mengetahui Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Lingga Dalam Menurunkan Angka Stunting di Kabupaten Lingga.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini (dikutip dalam Sugiyono, 2014) sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Jenis pendekatan kualitatif ini dipilih agar dapat menggambarkan realitas pelaksanaan pemerintah dalam mengatasi masalah stunting yang ada di Kabupaten Lingga. Objek dan Lokasi penelitian ini adalah pelaksanaan pemerintah dalam mengatasi masalah stunting yang ada di Kabupaten Lingga. Peneliti tertarik mengambil objek penelitian pemerintah kabupaten Lingga karena, salah satu stunting yang tertinggi di kepulauan riau namun fenomena yang terjadi bahwa

peneliti menemukan beberapa masalah yaitu terdapat keluhan masyarakat. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016:224). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun jumlah informan yang peneliti dapatkan berjumlah 10 orang.

III. Hasil dan Pembahasan

Upaya pemerintah Kabupaten Lingga dalam pengelolaan penurunan angka stunting Kabupaten Lingga yang dikeluarkan dalam peraturan Bupati No 78 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan Stunting dan Penanggulangan Stunting, maka peneliti menganalisis upaya pemerintah kabupaten lingga dalam pengelolaan penurunan angka stunting di kabupaten lingga dengan menggunakan teori Menurut Adisasmita (2011: 22)

A. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan menentukan langkah dalam pencapaiannya. Faktor penghambat pencegahan stunting masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan tidak terlalu mementingkan stunting ini. Misalnya, ada yang diberikan obat malah tidak diminum khususnya ibu hamil. Adapun yang telah dilakukan di dinas kesehatan ini dalam pencegahan dari berbagai program yang telah tersusun salah satunya kita melakukan sosialisasi dan seminar untuk mengajak kaum ibu memperhatikan pola hidup sehat. Kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan anak sebagai salah satu upaya deteksi dini kesehatan pada anak. Kegiatan ini merupakan program UKS puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan anak. Kegiatan pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan, berat badan, tinggi badan, kepala dan rambut, telinga, kulit dan kuku. Selain itu dilakukan penyuluhan tentang kesehatan. Kegiatan pemeriksaan berkala diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sejak dini hidup sehat, bersih yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten lingga dapat diketahui bahwa salah satu faktor pendukung sumber daya manusia dengan melibatkan semua stakeholder, dalam hal ini organisasi perangkat daerah, masyarakat melalui program yang dicanangkan bertujuan untuk membantu upaya menurun dan menekankan angka stunting.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan

waktunya dimulainya. Upaya yang dilakukan melalui cakupan memberikan edukasi terkait hal-hal yang dapat membantu menurunkan stunting dengan melakukan sosialisasi oleh Dinas terkait. Upaya pemerintah kabupaten Lingga untuk menurunkan angka stunting di kabupaten Lingga dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan advokasi ke daerah-daerah kecamatan maupun desa, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui pentingnya pencegahan stunting, dan pemerintah kabupaten Lingga melalui dinas juga memberikan beberapa program-program untuk menunjang ekonomi masyarakat yang merupakan salah satu upaya untuk penurunan angka stunting. Pemerintah pusat juga memberikan program-program yang diharapkan dapat menunjang atau membantu masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk pemenuhan gizi. Penyaluran itu melalui desentralisasi dari pusat ke daerah, dan daerah mengelola program yang digalakkan oleh pemerintah pusat sebagai perpanjangan tangan kepada masyarakat yang berhak dan layak menerima bantuan tersebut. Dengan memberikan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat kabupaten Lingga, pemerintah pusat juga memberikan bantuan yang dikelola oleh daerah untuk disalurkan kepada masyarakat untuk menunjang perekonomian masyarakat yang tergolong masih rendah untuk memenuhi angka kecukupan gizi, program ini merupakan salah satu upaya pencukupan gizi kepada masyarakat. Pelaksanaan program bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menekan upaya-upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Lingga, terlihat dari masyarakat yang benar-benar memerlukan uluran tangan dari pemerintah haruslah sesuai dan tepat sasaran. Pemberian edukasi dan sosialisasi merupakan faktor yang sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka paham pentingnya memberikan makanan yang bernilai gizi untuk mengurangi resiko stunting kepada anak sejak dini sebagai upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Lingga.

C. Pengawasan

Pengawasan merupakan faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi supaya program-program dapat terealisasi sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah dicanangkan. Mengawasi jalannya program-program yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, daerah mengawasi melalui dinas terkait agar program yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik, tepat sasaran. Perlunya pengawasan dilakukan untuk melihat apakah bantuan-bantuan yang digalakkan pemerintah pusat maupun daerah terkait upaya yang pengelolaan penurunan stunting tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang memang mengalami stunting (kekurangan dalam pemenuhan gizi) dan tepat sasaran. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lingga sudah sangat baik melalui masing-masing OPD yang mempunyai tanggung jawab mengemban tugas untuk mengawasi jalannya bantuan program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah. Adanya pengawasan merupakan suatu kewajiban dan keharusan OPD terkait untuk melihat dan mengawasi jalannya penyaluran program-program bantuan dari pusat maupun daerah agar tepat sasaran, dan mengurangi terjadinya penyelewengan dan kecurangan yang terjadi dilapangan untuk menekan angka stunting di Kabupaten Lingga. Fungsi pengawasan sangatlah penting untuk mengontrol jalannya penyaluran dan ketepatan sasaran penerima bantuan dari pemerintah maupun pemerintah daerah itu sendiri.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya Pemerintah Kabupaten Lingga Dalam Pengelolaan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Lingga sudah sangat baik, namun ada tiga indikator yang digunakan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Namun ada satu indikator yang belum maksimal yaitu perencanaan.

1. Perencanaan

Perencanaan dalam upaya pemerintah kabupaten lingga dalam pengelolaan penurunan angka stunting di kabupaten lingga sudah cukup baik. Perencanaan merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Kendala kendala yang dialami menyebabkan keterlambatan datangnya program bantuan sehingga pemerintah harus lebih teliti dalam menentukan perhitungan terkait situasi kondisi yang terjadi dilapangan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam upaya pemerintah kabupaten lingga dalam pengelolaan penurunan angka stunting di kabupaten lingga sudah berjalan cukup baik dikarenakan pemerintah kabupaten lingga sudah menjalankan tupoksi mereka sesuai dengan aturan melalui OPD terkait yang mempunyai tanggung jawab menjalankan tugas untuk memprerkecil angka stunting di kabupaten lingga. Sosialisasi dan edukasi yang telah diberikan kepada masyarakat diharapkan mampu ditelaah oleh masyarakat sadar akan pentingnya menekan dan mengurangi angka stunting dengan mengkonsumsi makanan yang bernilai gizi kepada keluarga dan anak.

3. Pengawasan

Pengawasan dalam upaya pemerintah kabupaten lingga dalam pengelolaan penurunan angka stunting di kabupaten lingga yang dilakukan oleh petugas sudah cukup baik, dikarenakan pengawasan yang dilakukan pemerintah harus melewati opd yang bersangkutan dalam rangka upaya pemerintah kabupaten lingga dalam pengelolaan penurunan angka stunting di kabupaten lingga.

V. Daftar Pustaka

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Kemendes RI (2018b). *Buletin Stunting*. Kementerian Kesehatan RI,1,2.
- Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), *Stop stunting dengan konseling*, (Jakarta: Penebar Plus, 2018)
- ren Ressie Ridua (2020) dengan judul *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur* Kementerian Kesehatan RI,2010.Standar antropometri Penilaian Status Gizi Anak.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2018 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi masyarakat indonesia.

VI. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasi yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yaitu :

1. Prof. Dr. Agung Dhamar Syakt, Spi.DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Bapak Kustiawan , selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan, masukan, saran dan motivasi serta nasehatnya kepada penulis.
4. Bapak Handrisal, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan, masukan,saran dan motivasi dalam penulisan penyelesaian skripsi saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak membekali penulisan dengan ilmu yang bermanfaat serta staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ikut juga berkontribusi;
6. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga yang telah memberikan banantuan, masukan, saran dan ide untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
7. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak Azali dan Ibu Rosna, serta adik-adikku Ari Andika Pradana, Amellia Rama Kurnia, Azka Alrafaeyza, serta Keluargaku yang selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungan dan do'anya selama ini, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini;
8. Keluarga besar saudara rantau terkhusus Muhammad Hafiz, Asrina, Wita Safitri, Bayu yang telah memberi masukan serta dukungan;
9. Keluarga besar Koran 16, yang selalu memberikan sumbangan ide ide dan dukungan;
10. Keluarga besar Sanggar Seni Megat, yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.